



# **HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA SERTA WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT**

Eli Sabrifha<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia  
Email: [elisabrifhaa@gmail.com](mailto:elisabrifhaa@gmail.com)

## **Abstract**

This study discusses the harmony between the rights and obligations of the state and citizens within the Indonesian democratic system, which is based on popular sovereignty and the principle of deliberation to reach consensus. Indonesian democracy places the people as the highest holders of power while emphasizing the balance between the fulfillment of rights and the implementation of obligations in national and state life. This research aims to analyze the relationship between rights and obligations as well as the role of deliberation and consensus in maintaining national unity and stability. The method used in this study is qualitative research with a descriptive approach through literature review from various legal sources and related references. The results show that harmony can be achieved when the state is able to protect the rights of citizens, while society actively carries out its obligations in democratic life. In addition, deliberation to reach consensus is a distinctive characteristic of Pancasila democracy because it prioritizes common interests over personal or group interests.

**Keywords:** Democracy, Indonesia, rights, obligations, deliberation.

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan prinsip musyawarah untuk mufakat. Demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun tetap menekankan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban serta peran musyawarah mufakat dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmoni dapat tercapai apabila negara mampu melindungi hak warga negara, sementara masyarakat turut menjalankan kewajibannya secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas demokrasi Pancasila karena mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Indonesia, hak, kewajiban, musyawarah.



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan nilai musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan dalam memperoleh hak, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan demokrasi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak warga negara, seperti hak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, warga negara juga berkewajiban menaati peraturan, menjaga persatuan, serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Apabila hak dan kewajiban dapat dijalankan secara seimbang, maka hubungan antara negara dan masyarakat akan berjalan dengan baik.

Selain itu, musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas demokrasi Indonesia yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Nilai tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara bijaksana demi menjaga persatuan bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti kurangnya kesadaran terhadap kewajiban dan munculnya sikap yang lebih mengutamakan hak pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam memperkuat demokrasi Pancasila di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta musyawarah untuk mufakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, membaca, dan memahami informasi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Hak dan Kewajiban dalam Kerangka Negara Demokratis.

Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak dapat diperoleh apabila kewajiban dijalankan dengan baik, begitu juga sebaliknya. Dalam sistem demokrasi, negara tidak hanya berfungsi menjalankan pemerintahan dan pemilihan umum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negara secara adil.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 sampai Pasal 34. Pasal-pasal tersebut memuat berbagai hak dasar warga negara, seperti hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan kehidupan yang layak. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menjaga persatuan bangsa, dan ikut serta dalam pembelaan negara.

Konsep hak dan kewajiban dalam negara demokrasi lahir dari pemikiran bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap individu

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 47.



memiliki hak yang wajib dilindungi oleh negara, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis.

Perlindungan hak warga negara tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan yang nyata. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara dapat menikmati haknya tanpa adanya diskriminasi, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kehidupan demokrasi Indonesia.<sup>2</sup>

### **Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Demokrasi Indonesia**

Kedaulatan rakyat merupakan dasar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki posisi penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, tetapi tetap mengikuti aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat memberikan wewenang kepada lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan secara sah dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilihat melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, masyarakat juga dapat

ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi tidak hanya memperhatikan kepentingan mayoritas, tetapi juga tetap menjamin hak kelompok minoritas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat dan dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semangat kedaulatan rakyat perlu terus dijaga agar demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai konstitusi dan Pancasila.<sup>4</sup>

### **Musyawarah untuk Mufakat sebagai Karakter Khas Demokrasi Pancasila**

Salah satu hal yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi liberal Barat adalah adanya tradisi musyawarah untuk mufakat yang berasal dari budaya dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Musyawarah mufakat tidak hanya digunakan sebagai cara mengambil keputusan, tetapi juga menjadi bentuk sikap bersama yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam Pancasila, musyawarah untuk mufakat tercermin dalam sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila tersebut mengandung makna bahwa keputusan yang baik diperoleh melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama, sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan setara.

<sup>2</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 88.

<sup>3</sup> Sri Soemantri, *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 34

<sup>4</sup> Dwi Sulisworo, et al., 'Demokrasi Pancasila dan Relevansinya di Era Kontemporer,' *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 1 (2018), hlm. 30–41.



Dalam ilmu politik, musyawarah mufakat sering disamakan dengan demokrasi deliberatif karena sama-sama menekankan dialog dan kesepakatan bersama. Namun, musyawarah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri karena didasarkan pada nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa kekeluargaan yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Penerapan musyawarah mufakat dapat ditemukan dalam berbagai lingkungan masyarakat, mulai dari rapat desa, forum masyarakat, hingga sidang lembaga negara. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menyelesaikan masalah bersama tanpa harus mengutamakan sistem voting yang dapat menimbulkan perpecahan antara pihak yang menang dan kalah.

Di era modern, penerapan musyawarah untuk mufakat menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya perbedaan pendapat, pengaruh media sosial, dan polarisasi dalam masyarakat. Meskipun demikian, musyawarah tetap memiliki peranan penting sebagai cara yang lebih damai dan bijaksana dalam menyelesaikan perbedaan serta menjaga persatuan bangsa dalam kehidupan demokrasi Indonesia.<sup>6</sup>

### **Harmoni Hak dan Kewajiban dalam Menjaga Stabilitas Nasional**

Harmoni antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara merupakan kondisi yang harus terus dijaga dan tidak dapat tercipta secara otomatis. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun warga negara. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dalam menjaga hubungan yang seimbang antara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi.

Dalam perspektif hukum, harmoni dapat tercapai apabila hukum mampu melindungi hak warga negara sekaligus menegakkan kewajiban secara adil. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga harus menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan melindungi seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan tertentu. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki rasa percaya terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Stabilitas nasional dalam negara demokrasi juga sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kepercayaan tersebut muncul ketika warga negara merasa bahwa hak-haknya benar-benar dijamin dan mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak dapat dibangun melalui tekanan atau pembatasan kebebasan, tetapi melalui hubungan yang baik antara negara dan masyarakat.

Selain itu, keadilan sosial menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni hak dan kewajiban. Ketimpangan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam masyarakat. Karena itu, negara perlu berkomitmen untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, kesempatan, dan pelayanan publik agar seluruh warga negara dapat merasakan hak-haknya secara adil dan merata.<sup>7</sup>

### **Relevansi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kenikian**

Demokrasi Pancasila dalam sistem hukum dan politik Indonesia bukanlah ideologi yang bersifat kaku, melainkan sistem demokrasi yang dapat berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar bangsa. Demokrasi ini tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Pancasila yang telah menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

<sup>5</sup> Muchamad Ali Safa'at, 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,' Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4 (2019), hlm. 745–766.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2020), hlm. 54.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), hlm. 78.



Di era modern, demokrasi Pancasila memiliki peranan penting karena mampu menjadi jalan tengah antara paham yang terlalu mengutamakan kebebasan individu dan sistem yang terlalu menekankan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila berusaha menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis.<sup>8</sup>

Nilai-nilai dalam demokrasi Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini, seperti ketimpangan sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan demokrasi Pancasila tidak berarti menolak perkembangan zaman, tetapi menyesuaikan nilai-nilai tersebut dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan jati diri bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara memiliki peranan penting dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi hak-hak warga negara, sementara masyarakat berkewajiban menaati hukum, menjaga persatuan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar utama demokrasi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat

diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pengawasan pemerintahan, dan proses pengambilan kebijakan negara. Selain itu, demokrasi Indonesia juga memiliki ciri khas berupa musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama, kebersamaan, dan penyelesaian masalah melalui dialog yang bijaksana.

Di era modern, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran terhadap kewajiban, ketimpangan sosial, dan munculnya perbedaan pandangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara negara dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mempertahankan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dengan demikian, harmoni hak dan kewajiban yang dilandasi kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan, stabilitas nasional, dan keberlangsungan demokrasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.

<sup>8</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 77

<sup>9</sup> Muhammad Alim, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara,' *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3 (2018), hlm. 584–602.



- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2020.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2019.
- Soemantri, Sri. *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 2018.
- Sulisworo, Dwi, et al. "Demokrasi Pancasila dan Relevansinya di Era Kontemporer." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 1, 2018.